

acc 10/02
2025

ANALISIS KINERJA ORGANISASI BIDANG PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN REMBANG

Feldyo Wijaya¹, Retna Hanani²

Departemen Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407,

Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Studi ini menganalisis kinerja organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, dengan fokus pada pengelolaan pasar tradisional dan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pasar Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif dan purposive sampling untuk seleksi informan. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Peneliti menggunakan teori Kinerja Organisasi dari Kumorotomo (1996) yang terdiri dari 3 indikator yaitu efisiensi, efektivitas, dan keadilan serta faktor penghambat Kinerja Organisasi menurut Soesilo (2014) yang terdiri dari 2 indikator yaitu Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Manajemen. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh dimensi kinerja organisasi yaitu efisiensi, efektivitas, dan keadilan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya APBD sehingga berpengaruh kepada rendahnya jumlah pasar SNI serta keadilan dalam penyediaan bangunan dan layanan yang diberikan. Faktor penghambat kinerja organisasi adalah kurangnya inovasi terkait kebijakan pengelolaan dan kurangnya pengembangan sistem pembayaran e-retribusi pasar dan sistem informasi manajemen pasar yang masih dalam tahap pengembangan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang belum baik dan perlu adanya peningkatan kapasitas kinerja dari pihak Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang guna memberikan pelayanan publik yang baik kepada pengguna pasar baik pedagang maupun masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Pelayanan Publik, Pasar Rakyat

ABSTRACT

This study analyzes the organizational performance of the Market Sector of the Trade and Cooperatives Service, Rembang Regency SMEs, with a focus on traditional market management and implementation of Indonesian National Standards (SNI) for People's Markets. This research uses qualitative methods with descriptive techniques and purposive sampling for informant selection. Triangulation is used to test the validity of the data. Researchers use the Organizational Performance theory from Kumorotomo (1996) which consists of 3 indicators, namely efficiency, effectiveness and justice as well as inhibiting factors of Organizational Performance according to Soesilo (2014) which consists of 2 indicators, namely Management Policy and Management Information Systems. The results of the analysis show that all dimensions of organizational performance, namely efficiency, effectiveness and justice, are not optimal. This is caused by the limited APBD which affects the low number of SNI markets as well as fairness in the provision of buildings and services provided. Factors inhibiting organizational performance are the lack of innovation related to management policies and the lack of development of market e-retribution payment systems and market management information systems which are still in the development stage. Overall, it can be concluded that the organizational performance of the Market Sector of the Trade and Cooperative Service, Rembang Regency UKM is not good and there is a need to increase the performance capacity of the Market Sector of the Trade and Cooperative Service, Rembang Regency UKM in order to provide good public services to market users, both traders and the public.

Keywords: Organizational Performance, Public Services, People's Market

PENDAHULUAN

Untuk memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik dan efisien, manajemen kinerja OPD sangat penting. Dengan manajemen kinerja yang baik, OPD dapat menetapkan tujuan yang jelas, mengukur pencapaian, dan melakukan evaluasi secara teratur. Manajemen kinerja yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan menentukan area mana yang memerlukan perbaikan. Akibatnya, manajemen kinerja yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Manajemen kinerja di tingkat organisasi berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, di mana terdapat struktur hubungan antar individu yang memiliki tujuan bersama untuk memajukan kepentingan kolektif. Kinerja organisasi sangat mempengaruhi arah yang akan diambil oleh seluruh anggotanya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kinerja yang baik agar visi organisasi dapat tercapai. Kinerja dari organisasi publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga berdampak

pada proses pembangunan di suatu daerah. Bagian Pasar Dinas, Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang merupakan Organisasi Pemerintah yang berkecimpung dalam bidang pelayanan perdagangan, koperasi dan juga UKM. Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang (Bidang Pasar) memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. Meningkatkan layanan publik;
- c. Menjadi penggerak ekonomi lokal; dan
- d. Menjadikan pasar tradisional berdaya saing tinggi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- e. Memberikan perlindungan dan perkuatan terhadap daya saing kepada Pedagang di Pasar tradisional; dan
- f. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut data yang penulis peroleh dari Dinas Indagkop & UKM Rembang terdapat sejumlah 15 Pasar umum, 8 Pasar desa, dan 4 Pasar hewan atau keseluruhan terdapat 27 Pasar yang ada di Kabupaten Rembang. Dari seluruh Pasar yang ada di Kabupaten Rembang baru ada satu Pasar yang berstandar SNI. Kesan masyarakat pada umumnya menganggap Pasar rakyat

sebagai tempat yang kotor dan berlumpur. Namun, pandangan negatif tersebut kini dapat dihilangkan dengan menerapkan standar baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat. Penerapan SNI Pasar Rakyat merupakan wujud nyata komitmen, terutama dari pemerintah daerah dan para pelaku usaha, untuk melindungi kepentingan konsumen di daerah masing-masing, yang juga secara tidak langsung akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (BSN, 2023).

Jumlah pedagang tradisional di Kabupaten Rembang mencapai 6.038 orang, namun manajemen penataan lahan berjualan di pasar belum optimal karena jumlah pedagang yang tidak menentu dan terus bertambah, termasuk pedagang sementara yang tidak terdata. Hal ini menyebabkan masalah lahan yang berdampak pada kenyamanan pedagang dan pembeli. Kepala Bidang Pasar Kabupaten Rembang mengakui adanya kendala dalam penataan lahan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen tinggi dari Bidang Pasar agar tercipta ketertiban dan kenyamanan di pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menata pasar tradisional agar nyaman bagi pedagang dan pembeli, meskipun dilakukan secara bertahap karena

keterbatasan anggaran. Penataan pasar ini juga didukung oleh pembayaran retribusi dari pedagang, yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.

Selain tentang terbatasnya dana dari Pemerintah sebagai penyebab kurangnya pemeliharaan Pasar di Kabupaten Rembang, terhambatnya pemeliharaan tersebut juga disebabkan oleh sistem retribusi dari masyarakat yang kurang optimal dan sering mengalami tunggakan. Hal tersebut juga berdampak langsung pada PAD yang mana akan menghambat pembangunan fasilitas daerah dalam hal ini yaitu pengelolaan Pasar di Kabupaten Rembang.

Tabel 1.1
Kondisi Bangunan Pasar Tradisional Kabupaten Rembang Tahun 2024

Nama Pasar	Kondisi Pasar	Status SNI
Pasar Kota Rembang	Kurang Baik	Belum
Pasar Magersari	Kurang Baik	Belum
Pasar Sulang	Cukup Baik	Belum
Pasar Sumber	Baik	Sudah
Pasar Lasem	Cukup Baik	Belum
Pasar Kreatif Lasem	Baik	Belum
Pasar Pamotan	Cukup Baik	Belum
Pasar Jolotundo	Cukup Baik	Belum
Pasar Kragan	Baik	Belum
Pasar Sarang	Baik	Belum
Pasar Tegaldowo	Baik	Belum
Pasar Gandri	Cukup Baik	Belum
Pasar Sedan	Baik	Belum
Pasar Pandangan	Baik	Belum
Pasar Wonokerto	Baik	Belum

Sumber: Indagkop UKM Kabupaten Rembang

Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Cabang Rembang menerapkan Program e-

Retribusi Pasar untuk mengatasi masalah pencatatan manual yang memungkinkan kesalahan atau kecurangan, serta kesulitan dalam memantau penarikan dan pelaporan dana retribusi. Kerja sama ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 510/0018/2018. Meskipun demikian, evaluasi diperlukan karena pelaksanaan pungutan retribusi berbasis non-tunai masih menghadapi kendala. Sesuai Pasal 6 dalam PKS, perjanjian ini berlaku selama 5 tahun (2018-2023) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan setelah evaluasi pelaksanaan kerja sama. Program e-Retribusi Pasar ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, serta memberikan kemudahan kepada pedagang dalam membayar retribusi (Febriani, 2023).

Tabel 1. 2
Tunggakan Retribusi Pasar Kabupaten Rembang

NO.	NAMA PASAR	TUNGGAKAN RETRIBUSI
1	PASAR REMBANG	440.412.750
2	PASAR MAGERSARI	22.586.000
3	PASAR SULANG	467.040
4	PASAR SUMBER	-
5	PASAR LASEM	184.021.826
6	PASAR KREATIF/BABAGAN LASEM	9.747.000
7	PASAR JOLOTUNDO	324.000
8	PASAR PAMOTAN	44.466.500
9	PASAR TEGALDOWO	-
10	PASAR PANDANGAN	6.856.500
11	PASAR KRAGAN	3.384.000
12	PASAR SEDAN	21.744.000
13	PASAR GANDRIROJO	-
14	PASAR SARANG	199.671.870
15	PASAR WONOKERTO	-

Sumber: Dindagkop UKM Kab. Rembang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 15 Pasar umum tradisional yang ada di Kabupaten Rembang hanya terdapat 4 Pasar yang tidak memiliki tunggakan dalam pembayaran retribusi. Hal tersebut disebabkan oleh sistem e-retribusi yang masih terkendala pada jaringan yang sering error. Tunggakan retribusi terbesar terdapat di Pasar Kota Rembang, Pasar Sarang, Pasar Lasem, Pasar Pamotan, Pasar Magersari, Pasar Sedan yang mana Pasar-Pasar tersebut memiliki tunggakan retribusi melebihi dari 10 juta rupiah, sedangkan Pasar yang memiliki tunggakan retribusi kurang dari 10 juta yaitu Pasar Kreatif Lasem, Pasar Pandangan, Pasar Kragan, Pasar Sulang, dan Pasar Jolotundo. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat

Pedagang Pasar di Kabupaten Rembang yang belum tuntas dalam membayar retribusi Pasar dan hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya proses renovasi maupun pembangunan fisik Pasar itu sendiri.

Di Kabupaten Rembang, pengelolaan retribusi pasar menghadapi tantangan signifikan, memicu penolakan dari pedagang akibat kenaikan tarif di tengah ekonomi yang sulit. Pedagang pasar Pamotan, bersama pedagang dari pasar tradisional lain di Rembang, menyampaikan protes melalui poster dan audiensi yang direncanakan dengan DPRD Rembang, mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait kenaikan retribusi yang hampir mencapai dua kali lipat untuk penyewa kios. Meskipun Kabid Pasar Dindagkop UKM Rembang mengklaim sosialisasi telah dilakukan, kondisi pasar tradisional yang kurang baik, pengelolaan yang belum efisien, serta masalah sistem E-Retribusi yang kurang optimal memperburuk situasi. Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kondisi fisik pasar, peningkatan kualitas pelayanan, dan inovasi kebijakan yang cermat diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat dan pendapatan pedagang, sekaligus mengatasi masalah

representasi jumlah pasar yang belum efisien dan kualitas pengelolaan yang belum memenuhi standar

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Dikutip dari artikel jurnal yang berjudul Pengertian Administrasi Publik: Sifat, Ruang Lingkup, Fungsi, Tujuan, dan Teorinya (Veronika, 2021), ada beberapa definisi administrasi publik dari para ahli, antara lain: Marx mendefinisikannya sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang disadari dengan penataan sistematis dan penggunaan sumber daya; Frederic Lane mengartikannya sebagai pengorganisasian sumber daya manusia dan fisik untuk mencapai tujuan kelompok; L.D White menyebutnya sebagai semua operasi untuk memenuhi kebijakan publik; Woodrow Wilson menyebutnya sebagai penerapan hukum secara rinci dan sistematis; dan F.A Nigro menyebutnya sebagai upaya kelompok kooperatif dalam pengaturan publik yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta berinteraksi dengan swasta dalam pelayanan masyarakat.

Paradigma Administrasi Publik

Penelitian ini menggunakan Paradigma Administrasi Publik ke 5 yaitu

Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Administrasi publik berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri, merambah teori organisasi, kebijakan publik, dan ekonomi politik. Asosiasi nasional administrasi publik terbentuk, dan program pendidikan MPA berkembang pesat (Nicholas Henry, 2004)

Manajemen Publik

Dikutip dari Buku yang berjudul Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik (Satibi, 2012), Konsep manajemen publik merupakan hasil penggabungan berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu politik, seperti yang dijelaskan oleh Overman dalam Keban (2004). Manajemen publik dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sektor-sektor publik oleh institusi pemerintah, yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi, dan evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja Organisasi

kinerja organisasi dapat diukur dari ekonomisasi penggunaan sumber daya, efisiensi input-output, efektivitas pencapaian tujuan, serta keadilan dan pemerataan dalam pelayanan publik. Sedangkan penjelasan kriteria penilaian kinerja organisasi pelayanan publik menurut Kumorotomo (1996) :

a. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam mendapatkan keuntungan, memanfaatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan rasionalitas ekonomi. Kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan tolok ukur efisiensi yang relevan.

b. Efektivitas

Efektivitas mengacu pada tercapainya tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut. Hal ini terkait dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsinya sebagai agen pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi. Kriteria ini berkaitan dengan ketercukupan

atau kepatutan dalam memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Isu pemerataan pembangunan dan layanan bagi kelompok marginal dapat dijawab melalui kriteria ini.

d. Daya Tanggap

Berbeda dengan bisnis swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara/pemerintah terhadap kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, kinerja organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan untuk memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Dalam penelitian analisis kinerja organisasi di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, tiga variabel utama yang dipilih adalah efisiensi, efektivitas, dan keadilan yang merupakan pendapat teori Kinerja Organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pemilihan masing-masing variabel tersebut:

a) Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya

untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks ini, efisiensi mencakup: Optimalisasi Sumber Daya: Efisiensi menggambarkan seberapa baik organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, dana, dan waktu, untuk menghasilkan output yang maksimal. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Pengukuran Kinerja: Efisiensi dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pelayanan publik

b) Efektivitas

Efektivitas berfokus pada sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Variabel ini mencakup beberapa aspek penting: Kualitas: Menilai kualitas output yang dihasilkan oleh organisasi, termasuk bagaimana layanan memenuhi standar yang ditetapkan dan harapan masyarakat. Produktivitas: Mengukur kuantitas dari jasa atau produk yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui seberapa banyak layanan yang dapat diberikan dalam periode tertentu. Kesiagaan: Penilaian menyeluruh terhadap kemampuan organisasi dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik dan tepat waktu. Ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan dan

memenuhi tuntutan pelayanan publik

c) Keadilan

Keadilan mempertanyakan aspek distribusi dan alokasi layanan yang diberikan oleh organisasi. Variabel ini penting karena: Ketercukupan atau kepantasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat: Organisasi harus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak diskriminatif. Isu pemerataan pembangunan: Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana layanan disebarkan secara merata, terutama bagi kelompok marginal yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Dengan memilih ketiga variabel ini efisiensi, efektivitas, dan keadilan

penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang. Variabel-variabel ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa segala permasalahan yang sudah peneliti jelaskan di bagian latar belakang.

Faktor Penghambat Kinerja Organisasi

Menurut (Soesilo, 2014), kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Struktur organisasi yang berkaitan dengan hubungan internal dan fungsi pelaksanaan aktivitas organisasi.
- b. Kebijakan pengelolaan yang mencakup visi dan misi organisasi.
- c. Sumber daya manusia yang terkait dengan kualitas karyawan dalam bekerja secara optimal.
- d. Sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki terkait penggunaan

teknologi dalam setiap aktivitas organisasi.

Dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, pemilihan dua variabel utama untuk mengukur faktor penghambat Kinerja Organisasi yaitu kebijakan pengelolaan yang mencakup visi dan misi organisasi serta sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database merupakan langkah penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pemilihan masing-masing variabel tersebut:

- a) Kebijakan Pengelolaan yang Mencakup Visi dan Misi Organisasi
Kebijakan pengelolaan yang jelas dan terarah sangat penting bagi setiap organisasi, terutama dalam konteks pelayanan publik. Pemilihan variabel ini mencakup beberapa aspek: Visi yang Jelas: Visi organisasi memberikan gambaran tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dengan memiliki visi yang jelas, seluruh anggota organisasi dapat memahami arah dan tujuan bersama, sehingga meningkatkan komitmen dan motivasi untuk mencapainya. Misi yang

Terdefinisi: Misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Misi yang kuat membantu dalam fokus pada tujuan operasional sehari-hari, memastikan bahwa semua kegiatan organisasi selaras dengan tujuan utama. Pengukuran Kinerja: Kebijakan pengelolaan ini memungkinkan organisasi untuk menetapkan indikator kinerja yang relevan, sehingga dapat mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

b) Sistem Informasi Manajemen yang Berhubungan dengan Pengelolaan Database

Sistem informasi manajemen (SIM) berfungsi sebagai alat penting dalam pengelolaan data dan informasi di organisasi. Pemilihan variabel ini memiliki alasan sebagai berikut: Pengelolaan Data yang Efisien: SIM memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data dengan efisien. Dengan sistem database yang terstruktur dengan baik, informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat, mendukung pengambilan

keputusan yang lebih baik. Dukungan Pengambilan Keputusan: Dengan menyediakan akses ke data yang terpusat dan terstruktur, SIM membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Analisis data yang dilakukan melalui sistem ini memungkinkan identifikasi tren dan pola yang relevan untuk strategi bisnis. Peningkatan Kinerja Organisasi: Implementasi SIM berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, produktivitas karyawan, serta pengurangan biaya operasional. Sistem ini juga mendukung integrasi data antar departemen, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di dalam organisasi.

Dengan memilih kedua variabel ini kebijakan pengelolaan yang mencakup visi dan misi serta sistem informasi manajemen penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor penghambat kinerja organisasi di Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang. Variabel-variabel ini saling terkait dan penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya memiliki arah strategis tetapi

juga alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena Kinerja Organisasi dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Rembang. Metode ini memungkinkan pemahaman yang fleksibel terhadap realitas sosial serta interaksi langsung dengan informan.

Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang terjadi serta menjelaskan hubungan dan dampaknya.

Penelitian ini bertujuan mengungkap fakta sosial dan memberikan pemahaman objektif terhadap Kinerja Organisasi yang dilaksanakan oleh Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang.

Penelitian ini akan dilaksanakan di dalam Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang khususnya di dalam Bidang Pasar dengan kajian kinerja organisasi. Bidang Pasar yang memiliki program kerja dalam mendukung pencapaian setiap visi dan misi organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang.

Subjek penelitian dipilih secara purposive, meliputi Kepala Bidang Pasar dan Staff Bidang Pasar serta pengguna Pasar baik Pedagang maupun Pembeli. Total 24 informan Untuk subjek pengguna Pasar Tradisional Kabupaten Rembang, peneliti menggunakan teknik *Non Probability Insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen terkait.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari studi pustaka, laporan resmi, dan dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk melengkapi data tertulis yang relevan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan bukti empiris.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan teori guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang

Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang dengan menggunakan indikator Kinerja Organisasi yang dikemukakan oleh Kumorotomo (1996), yaitu 3 variabel yang peneliti pilih seperti efisiensi, efektifitas, dan keadilan.

Berdasarkan informasi yang tersedia, efisiensi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Rembang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan infrastruktur, keamanan yang tidak memadai, dan manajemen tata kelola yang lemah. Dampaknya adalah masalah kebersihan dan kenyamanan, kerugian bagi pedagang, dan penurunan potensi pendapatan. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur, meningkatkan keamanan, dan menerapkan tata kelola yang lebih baik.

Efektivitas pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Rembang masih jauh dari harapan. Kualitas pelayanan yang buruk, kesiapan pegawai yang terbatas, penegakan aturan yang lemah, dan minimnya kolaborasi, mengakibatkan ketidakpuasan pedagang dan menghambat pencapaian tujuan pengelolaan pasar. Perbaikan mendesak diperlukan melalui peningkatan kualitas layanan, penegakan aturan yang tegas, dan sinergi yang kuat antar pihak terkait agar pasar dapat memberikan manfaat optimal bagi semua.

Menilai dari pernyataan beberapa informan yang sudah peneliti wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa aspek keadilan dalam menyediakan ketercukupan/kepantasan dan pemerataan layanan yang ada di Pasar Tradisional Kabupaten Rembang belum mencerminkan hasil yang sesuai dengan keinginan dari para pengguna Pasar. Penyebab utama dari hal tersebut adalah terbatasnya anggaran yang ada serta kekurangan SDM sehingga pihak Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang tidak bisa secara maksimal menyediakan pemerataan layanan serta ketercukupan/kepantasan lahan dan

bangunan yang baik bagi pengguna Pasar (penjual maupun Pembeli).

Secara keseluruhan, kinerja organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang, jika diukur menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, dan keadilan menurut Kumorotomo (1996), masih belum optimal. Efisiensi pengelolaan pasar rendah akibat kurangnya pemeliharaan infrastruktur, keamanan, dan tata kelola. Efektivitas juga rendah karena kualitas pelayanan buruk, kesiapan pegawai terbatas, penegakan aturan lemah, dan kurangnya kolaborasi, yang menyebabkan ketidakpuasan pedagang. Aspek keadilan belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran dan SDM menghambat penyediaan layanan yang memadai dan merata bagi pengguna pasar. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki semua aspek ini, termasuk peningkatan kualitas layanan, penegakan aturan yang lebih tegas, peningkatan kolaborasi, serta peningkatan anggaran dan kualitas SDM.

Faktor Penghambat Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang

Kebijakan Pengelolaan

Berdasarkan informasi yang diberikan, pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Rembang menghadapi kendala dalam inovasi kebijakan untuk tata kelola, infrastruktur, dan modernisasi, termasuk sistem e-retribusi yang belum optimal. Pedagang mengeluhkan tata kelola pasar yang kurang maksimal, sementara staf dan pedagang kaki lima menyoroti kekurangan dalam sistem e-retribusi. Pemahaman pedagang tentang sistem e-retribusi perlu ditingkatkan, dan sistem itu sendiri perlu disempurnakan. Kurangnya inovasi dan kebijakan pengelolaan yang maksimal menyebabkan penurunan daya beli masyarakat di pasar tradisional, yang lebih memilih belanja *online*.

Sistem Informasi Manajemen

Kualitas sistem informasi manajemen yang dilaksanakan oleh Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang masih terdapat kendala terutama pada sistem jaringan dalam pembayaran e-retribusi serta dirasa belum efisien bagi Pedagang karena belum terintegrasi secara langsung dengan rekening. Selain itu, Pedagang juga banyak yang tidak setuju karena sistem pembayaran e-retribusi ini dirasa cukup memberatkan yang per bulan

dibandingkan dengan sistem pembayaran manual yang dilakukan per hari. Lalu dari pihak Bidang Pasar sendiri sudah melakukan upaya perbaikan jaringan serta konsolidasi dengan pihak yang bertanggungjawab seperti Bank, Penyedia Layanan, Operator dan juga Juru Pungut untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan saat melakukan input data pembayaran retribusi. Terobosan lainnya mengenai layanan sistem informasi manajemen, pihak Bidang Pasar juga akan merencanakan SIPPBANG yaitu Sistem Informasi Pasar Rembang yang akan dilaksanakan di 3 Pasar yaitu Pasar Sumber, Tegaldowo, dan Jolotundo.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang masih menghadapi berbagai tantangan. Efisiensi rendah akibat keterbatasan anggaran dan SDM berdampak pada buruknya infrastruktur, keamanan, dan tata kelola pasar. Efektivitas juga lemah karena rendahnya kualitas pelayanan, minimnya pelatihan pegawai, serta kurangnya penegakan aturan dan kolaborasi. Aspek keadilan belum optimal, terlihat dari ketidakseimbangan fasilitas bagi pedagang. Faktor utama penghambat

kinerja adalah kurangnya inovasi kebijakan pengelolaan dan sistem e-retribusi yang belum optimal. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIPPBANG) diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pasar. Perbaikan kebijakan, infrastruktur, SDM, dan sistem manajemen diperlukan agar kinerja organisasi lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran untuk meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran: Maksimalkan retribusi pasar untuk menghindari tunggakan dan meningkatkan pengelolaan aset serta pendapatan daerah guna renovasi dan perbaikan infrastruktur pasar.
2. Pengembangan SDM: Adakan pelatihan berkelanjutan, evaluasi berkala, serta peningkatan koordinasi antar sub bagian untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan pegawai.
3. Peningkatan Pelayanan Publik: Pastikan distribusi lokasi dagang yang merata, akses setara terhadap fasilitas, serta pengawasan objektif guna menciptakan

lingkungan pasar yang tertata dan nyaman.

4. Inovasi Kebijakan: Modernisasi tata kelola pasar dengan penyempurnaan sistem e-retribusi agar lebih efisien, terintegrasi, serta mudah dipahami oleh pedagang.
5. Implementasi SIPPBANG: Segera realisasikan Sistem Informasi Pasar Rembang (SIPPBANG) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pasar.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Rembang dapat meningkat, memberikan kemudahan bagi masyarakat kepercayaan publik terhadap instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aba Tabisa. (2022). Retribusi Pasar di Rembang Masih Bocor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang (BPS-Statistics of Rembang Regency). (n.d.).
- Biro Rembang. (2023). Pasar Sumber Rembang Raih Predikat Pasar SNI.
- BSN. (2023, May 12). Penerapan SNI Pasar Rakyat Tingkatkan Daya Saing Pasar Tradisional Jawa Tengah.
- Febriani, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pembayaran Retribusi Berbasis Non Tunai e-Retribusi Selama Lima Tahun Berjalan pada Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
- Firul, O., Riyanti, N., Sundarso, R., Profesor, J., & Soedarto, H. (n.d.). Analisis Kinerja Organisasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Semarang.
- Ilham Akbar. (2022). Pasar Tradisional Rembang Kumuh, Dindakop UKM: Sampah Jadi Masalah.
- Ilyas al-Musthofa. (2022a). Pasar Kreatif Lasem Masih Sepi, Baru 47 Pedagang yang Beroperasi.
- Ilyas al-Musthofa. (2024a). Paguyuban Pedagang Pasar Ramai-Ramai Tolak Kenaikan Retribusi dengan Pasang Baner.
- Lingkarjateng.id. (2024). Pemkab Rembang Lakukan Penyesuaian Tarif Retribusi Pasar.
- Mifta Rembang Kominfo. (2024). Tiga Pasar di Rembang Diusulkan Berstandar Nasional Indonesia.
- Mukhammad Fadlil. (2024). Gus Mus Kritik Pasar Rembang Semrawut:

Konon Bupatiya Pengin Jadikan
Mal.

Musyafa Musa. (2021). Pasar Rembang
Direlokasi, Lokasi Lama
Dijadikan Ruang Terbuka.

Redaksi Halo Semarang. (2023).
Pembangunan Pasar Kragan
Rembang Dilanjutkan.

Saputri, A. I., Maesaroh, D., & Si, M.
(n.d.). Analisis Kinerja
Organisasi Dinas
Pemadam
Kebakaran Kota Semaran
g.